



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan II
2019

Penyusun:

Penanggung Jawab: Kepala Kanwil DJPb Prov. Riau | Ketua Tim:
Kepala Bidang PPA II | Editor: Hasan Fauzi, Henjang Prasetiawan |
Anggota: Sugino | Syarifah Fauziah | Syafruddin | Rini Apriani

KANWIL DJTJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI RIAU

DAFTAR ISI

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	1
A. Produk Domestik Regional Bruto.....	1
B. Inflasi.....	3
C. Indikator Kesejahteraan.....	3
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	5
A. Pendapatan Negara.....	5
B. Belanja Negara.....	9
C. Prognosis Realisasi APBN.....	11
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	12
A. Pendapatan Daerah.....	13
B. Belanja Daerah.....	16
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019.....	17
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	18
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	18
B. Pendapatan Konsolidasian	18
C. Belanja Konsolidasian	20
D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB	21
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....	23
A. Jangan Tergantung Dana Bagi Hasil (DBH), Maksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	23
B. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tidak terealisasi/termanfaatkan oleh pemerintah daerah.....	24

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Pada triwulan II tahun 2019 ekonomi Riau tumbuh 2,80%, lebih baik dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,34 %, namun masih berada di bawah target dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau, maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara itu, inflasi bulan Juni mencapai 3,41% (yoy). Membaiknya kondisi ekonomi Riau diikuti oleh menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,57%, dan kemiskinan menjadi 7,08%.

Tabel 1.1 Indikator Ekonomi Triwulan II 2019 beserta Target dalam RKPD dan RKP

Indikator Ekonomi	TW II	RKPD	RKP
Pertumbuhan Ekonomi (yoy)	2,80	3,91	3,56 *)
Tingkat Inflasi (yoy)	3,41	4,30	3,50
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,57	6,60	5,77
Tingkat Kemiskinan	7,08	6,20	6,59

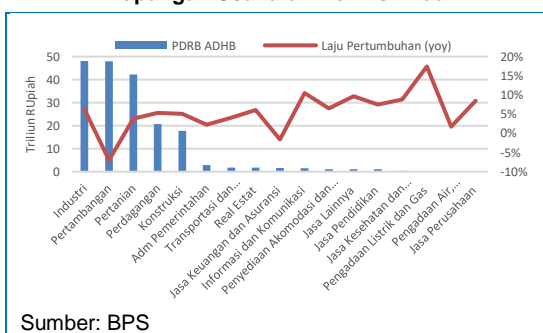
Sumber: BPS Provinsi Riau, Bappenas, Bappeda Provinsi Riau

*) Target untuk Provinsi Riau

A. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Provinsi Riau triwulan II 2019 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp189,95 triliun. Angka ini merupakan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia dan terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa dan berkontribusi sebesar 4,75% terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Riau triwulan II 2019 mencapai 2,80% (yoy), lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar 2,34%, namun masih berada di bawah target RKPD sebesar 3,91% dan RKP sebesar 3,56%.

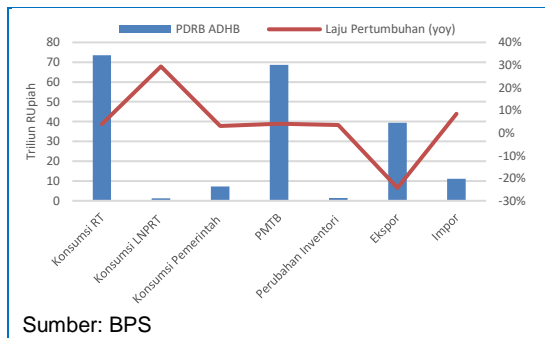
Grafik 1.1 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Lapangan Usaha di Provinsi Riau



Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian; dan Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami kontraksi masing-masing minus 6,97%, dan minus 1,55%. Pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh 17,43%. Struktur

ekonomi Riau triwulan II 2019 dari sisi produksi lima lapangan usaha terbesar yaitu Industri Pengolahan (25,32%); diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian (25,24%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,20%); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,90%); dan Konstruksi (9,35%).

Grafik 1.2 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Pengeluaran di Provinsi Riau

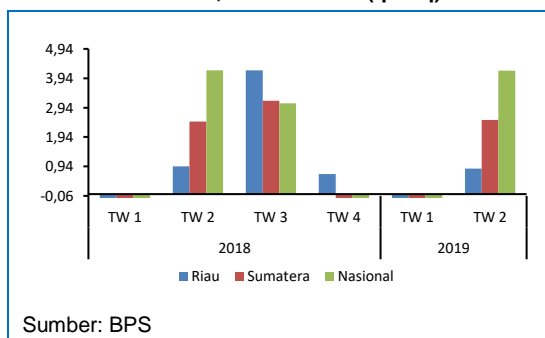


Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 29,38%, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,99%, dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

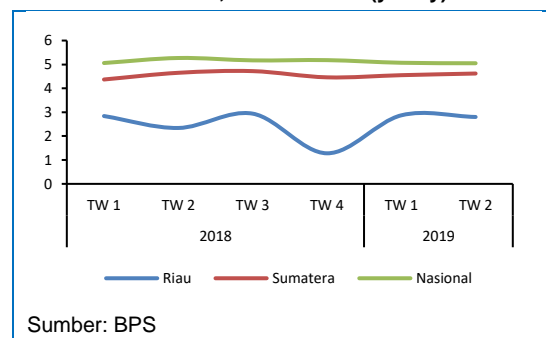
(PK-RT) sebesar 3,91%. Meningkatnya konsumsi LNPRT didorong oleh kegiatan pemilu presiden dan legislatif. Struktur ekonomi Provinsi Riau triwulan II 2019 secara pengeluaran didominasi oleh komponen PK-RT sebesar 38,73%, diikuti PMTB 36,13%, dan Ekspor Barang dan Jasa 20,79%.

Adapun ekonomi Provinsi Riau triwulan II 2019 terhadap triwulan I 2019 (qtq) tumbuh sebesar 0,87%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,90%, PMTB sebesar 3,67%, dan Konsumsi Pemerintah 6,11%. Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah erat kaitannya dengan adanya momen lebaran dan libur bersama pada triwulan II 2019.

Grafik 1.3 Perkembangan Ekonomi Riau, Sumatera, dan Nasional (q-to-q)



Grafik 1.4 Perkembangan Ekonomi Riau, Sumatera, dan Nasional (y-on-y)



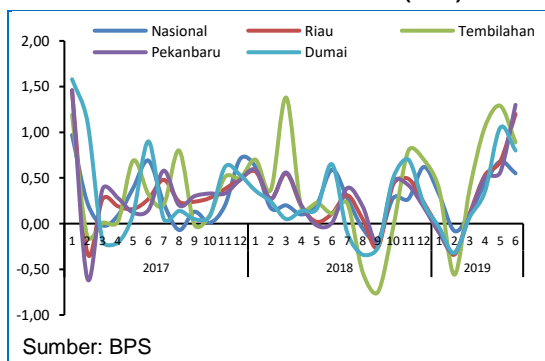
Di kawasan Sumatera, PDRB Provinsi Riau merupakan yang terbesar kedua, namun pertumbuhannya paling rendah. Hal ini terjadi karena ekonomi Riau masih bergantung pada pertambangan minyak dan kelapa sawit, padahal harga minyak dunia cenderung turun. Di samping itu adanya pemberlakuan Permendag Nomor 21 Tahun 2019 Permen ESDM Nomor 42 tahun 2018 mengenai Prioritas Produksi Hasil Pertambangan untuk Kebutuhan Industri Pengolahan Domestik yang menyebabkan kontraksi ekspor luar negeri. Selain itu *lifting* minyak menurun (*natural declining*) disebabkan belum adanya kepastian penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) secara *full scale* menyusul beralihnya kontrak pengelolaan blok Rokan dari perusahaan swasta

ke BUMN pada tahun 2021. Demikian juga dengan industri kelapa sawit yang masih dibayangi isu pembatasan impor oleh Uni Eropa dan perubahan orientasi penjualan dari ekspor ke domestik seiring dengan kebijakan pemerintah atas perluasan penggunaan bahan bakar biodiesel ke non-PSO (*Public Service Obligation*).

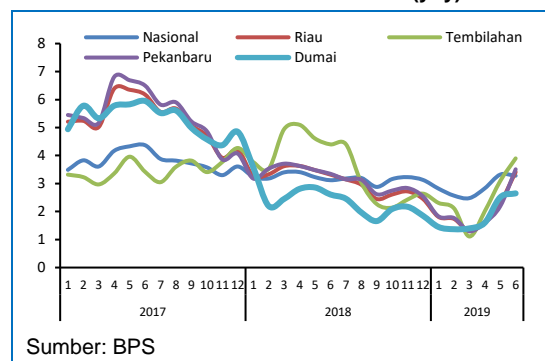
B. Inflasi

Inflasi di Provinsi Riau pada bulan Juni mencapai 1,20% (mtm) atau 3,41% (yoy), yang berarti Inflasi Tahun Kalender telah mencapai sebesar 2,13%. Lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28% (yoy) dan melampaui target RKPD sebesar 3,40%, tetapi masih di bawah target RKP sebesar 3,50%. Selama lima bulan terakhir inflasi di Riau mengalami peningkatan, hal tersebut terutama disumbang oleh inflasi bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 4,56% diikuti kelompok sandang yakni sebesar 0,44%; kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,34%.

Grafik 1.5 Perkembangan Inflasi di Provinsi Riau dan Nasional (mtm)



Grafik 1.6 Perkembangan Inflasi di Provinsi Riau dan Nasional (yoy)



Tingginya inflasi kelompok bahan makanan sebagian besar disumbang oleh kenaikan harga cabai merah secara signifikan yang disebabkan oleh masih tingginya permintaan pada saat berakhirnya masa panen, seiring terjadinya kelangkaan pasokan di daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai pemasok utama cabai merah Riau.

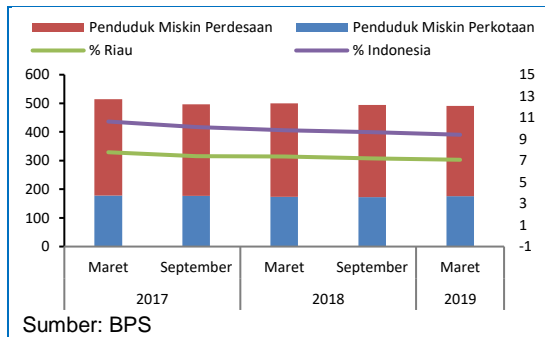
Inflasi ke depan diperkirakan masih akan meningkat, yang berasal dari tekanan inflasi kelompok bahan makanan. Oleh sebab itu, upaya pengendalian harga komoditas pangan harus ditingkatkan. Kendala yang dihadapi Provinsi Riau dalam pengendalian inflasi pangan antara lain: 1) Terbatasnya produksi lokal dan tingginya ketergantungan Riau terhadap pasokan dari provinsi lain, 2) Panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan harga komoditas pangan pokok di Riau menjadi lebih mahal, 3) Relatif tingginya biaya logistik karena kondisi infrastruktur jalan yang kurang mendukung.

C. Indikator Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya penyebaran

pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Semakin sejahtera suatu daerah maka semakin sedikit jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

Grafik 1.7 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Riau

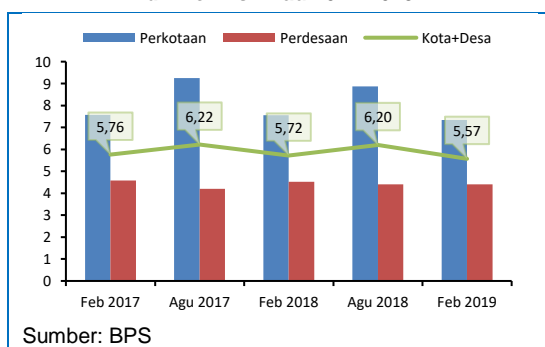


Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau bulan Maret 2019 sebanyak 490,72 ribu jiwa atau sebesar 7,08% dari total penduduk Provinsi Riau yang tersebar di Perkotaan (6,28%) dan Pedesaan (7,62%). Jika dibandingkan periode Maret 2018 yang berjumlah 500,44 ribu jiwa atau 7,39%, terjadi penurunan

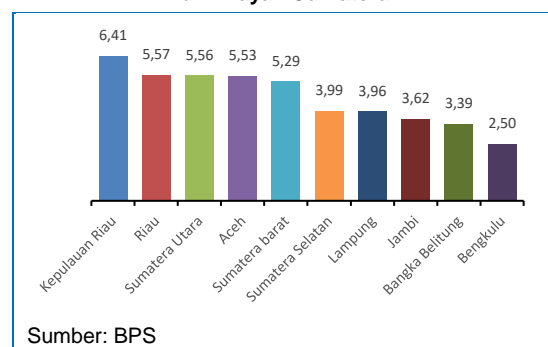
sebanyak 0,31%. Hal tersebut sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan secara nasional yang menurun dari 9,82% pada Maret 2018 menjadi 9,41% pada Maret 2019. Meskipun demikian, angka tersebut masih berada di atas target RKPD sebesar 6,20% dan RKP sebesar 6,59%.

Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran. Angkatan kerja di Riau bulan Februari 2019 sebanyak 3,30 juta orang, bertambah 0,5 ribu orang dibanding Februari 2018. Penduduk yang bekerja pada Februari 2019 sebanyak 3,11 juta orang, bertambah 5,21 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2018 sebanyak 183,7 ribu atau 5,57%, menurun sebesar 0,15% dari periode yang sama tahun lalu yang berjumlah 188,41 ribu orang. TPT di perkotaan sebesar 7,34%, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan yang hanya 4,41%.

Grafik 1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Riau 2017-2019



Grafik 1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Sumatera



Meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di Riau mengindikasikan keberhasilan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran di antaranya melalui program padat karya di kelurahan/desa dalam bentuk padat karya tunai (*cash for work*) yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara gotong royong secara swakelola melibatkan masyarakat setempat.

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Pada tahun 2019 Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar Rp18,64 triliun dan pagu belanja sebesar Rp35,29 triliun. Target pendapatan tahun ini lebih tinggi 3,81%, demikian juga pagu belanja naik 16,64% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2018 dan Tahun 2019 (dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
A. PENDAPATAN NEGARA	17.956	6.508	36,2	18.641	7.948	42,64
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	17.956	6.508	36,2	18.641	7.948	42,64
1. Penerimaan Pajak	17.311	6.117	35,3	18.024	7.527	41,76
2. PNPB	646	391	60,6	617	421	68,35
II. HIBAH	-	-	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	30.258	13.129	43,4	35.293	15.656	44,36
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	8.603	2.626	30,5	8.326	3.388	40,69
1. Belanja Pegawai	2.942	1.309	44,5	2.761	1.425	51,61
2. Belanja Barang	3.807	1.021	26,8	3.784	1.475	38,98
3. Belanja Modal	1.839	296	16,1	1.759	487	27,66
4. Belanja Bantuan Sosial	16	1	3,5	21	1	5,84
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-
II. TKDD	21.655	10.504	48,5	26.968	12.268	45,49
1. Transfer ke Daerah	20.393	9.748	47,8	25.531	11.408	44,68
a. Dana Perimbangan	20.239	9.671	47,8	25.286	11.286	44,63
1) Dana Bagi Hasil	7.748	2.997	38,7	10.982	4.239	38,60
2) Dana Alokasi Umum	8.147	4.903	60,2	8.991	5.236	58,24
3) Dana Alokasi Khusus	4.345	1.771	40,8	5.314	1.810	34,07
b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
c. Dana DIY	-	-	-	-	-	-
d. Dana Transfer Lainnya	154	77	50,0	245	122	50,00
2. Dana Desa	1.262	756	59,9	1.437	860	59,85
SURPLUS (DEFISIT)	(12.302)	(6.622)	53,8	(16.652)	(7.708)	46,29

Sumber: OMSPAN, Kanwil DJP Riau (pendapatan pajak), Kanwil DJBC Riau (pendapatan Bea dan Cukai)

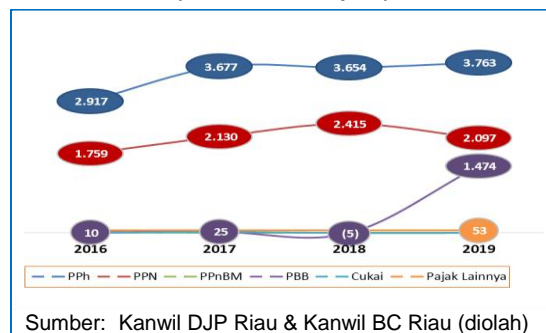
Realisasi pendapatan negara di Riau sampai dengan triwulan II 2019 mencapai Rp7,95 triliun, tumbuh 22,14% bandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula dengan realisasi belanja negara mengalami pertumbuhan 19,25% menjadi Rp15,66 triliun.

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

Sampai dengan akhir triwulan II 2019, penerimaan perpajakan di Riau dapat terealisasi sebesar Rp7,53 triliun atau 41,76% dari target Rp18,02 triliun. Realisasi ini naik Rp1,4 triliun (23,5%) dari tahun 2018. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp7,39 triliun dan pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp133,2 miliar. Pendapatan pajak dalam negeri

Grafik 2.1 Realisasi Pajak 2016 s.d. 2019 di Riau (dalam Miliar Rupiah)



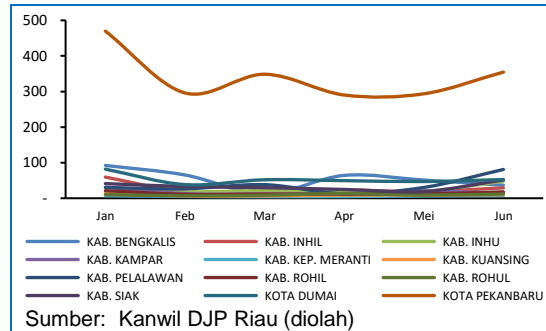
terdiri dari PPh, PPN, PPnBM, PBB, Cukai dan Pajak Lainnya dengan penerimaan masing-masing sebesar Rp3,76 triliun, Rp2,1 triliun, Rp1,91 miliar, Rp1,47 triliun, Rp0,63 miliar dan Rp53,19 miliar.

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh sebesar Rp3,76 triliun, menyumbang 50,92% dari total penerimaan perpajakan atau 42,09% dari targetnya Rp8,94 triliun. Realisasi ini naik Rp23,70 miliar atau 0,64% dibanding penerimaan periode yang sama tahun lalu Rp3,65 triliun.

Kota Pekanbaru merupakan wilayah dengan penerimaan terbesar Rp2,05 triliun atau 54,55% dari total penerimaan. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penyumbang terkecil dengan penerimaan sebesar Rp35,94 miliar.

Grafik 2.2 Penerimaan PPh Per Kabupaten/Kota (dalam Miliar Rupiah)

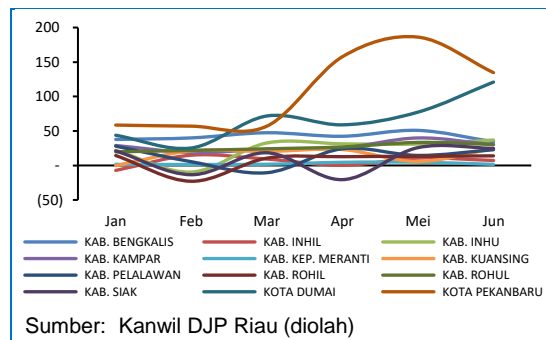


Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penyumbang terkecil dengan penerimaan sebesar Rp35,94 miliar.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN triwulan II 2019 sebesar Rp2,1 triliun (30,13% dari target), menurun 13,16% dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp2,41 triliun. Penurunan ini diindikasikan di antaranya karena program percepatan restitusi PPN sebagaimana diatur dalam Permenkeu Nomor 39/PMK.03/2018 di mana proses untuk mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebelumnya membutuhkan waktu hingga 10 bulan menjadi hanya 1 bulan. Penerimaan PPN tertinggi di Kota Pekanbaru sebesar Rp650,97 miliar diikuti oleh Kota Dumai sebesar Rp398,10 miliar, dan Kab. Bengkalis sebesar Rp252,75 miliar.

Grafik 2.3 Penerimaan PPN Per Kabupaten/Kota (dalam Miliar Rupiah)

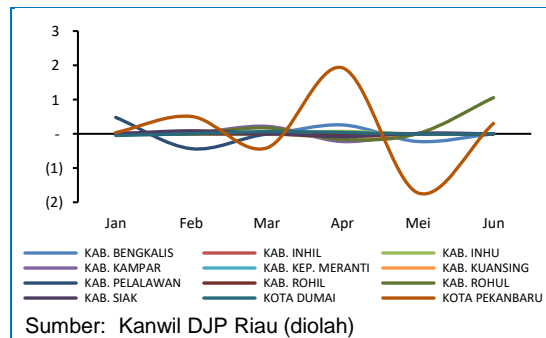


Penerimaan PPN tertinggi di Kota Pekanbaru sebesar Rp650,97 miliar diikuti oleh Kota Dumai sebesar Rp398,10 miliar, dan Kab. Bengkalis sebesar Rp252,75 miliar.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penerimaan PPnBM terealisasi sebesar Rp1,91 miliar (12,58%) dan hanya berkontribusi 0,03% dari total penerimaan perpajakan, turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018, Rp2,15 miliar. Sebagian besar pendapatan PPnBM berasal dari Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp1,06

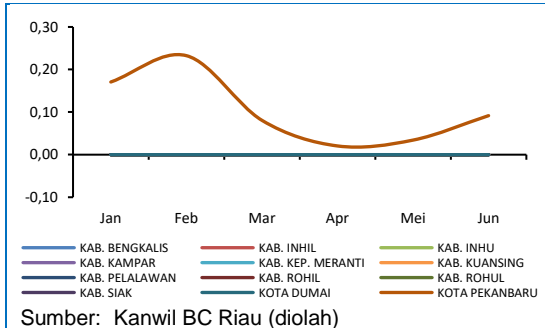
Grafik 2.4 Penerimaan PPnBM Per Kabupaten/Kota (dalam Miliar Rupiah)



miliar (55,49%) dan Kota Pekanbaru sebesar Rp634 juta (33,18%).

d. Penerimaan Cukai

Grafik 2.5 Penerimaan Cukai Per Kabupaten/Kota (dalam Miliar Rupiah)



Penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp630 juta atau 11,52% dari target tahun 2019 mengalami pertumbuhan dibanding tahun lalu yang terealisasi Rp24,4 juta. Di wilayah Provinsi Riau, hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai penerimaan cukai sedangkan sebelas Kabupaten/Kota yang lain tidak ada.

e. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional

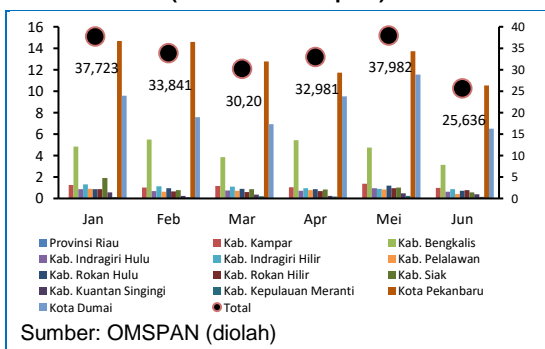
Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan II tahun 2019 mencapai Rp133,2 miliar atau 45,2%, terdiri dari penerimaan bea masuk Rp84,69 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp48,5 miliar.

SINDOnews - PEKANBARU - Dalam rangka mengoptimalkan pengamanan penerimaan pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai di wilayah Riau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Provinsi Riau menjalin sinergi dengan menandatangani kesepakatan Satuan Tugas Bersama, Rabu (22/5/2019). Ruang lingkup kerja sama antara Bea Cukai dan Pajak meliputi *Joint Analysis* yaitu melakukan pertukaran informasi dan analisis bersama atas Potensi Penerimaan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai dan menargetkan wajib pajak yang berisiko tinggi. *Joint Collection* yaitu melakukan akselerasi pembayaran tagihan/piutang, jika diperlukan dilakukan langkah pemblokiran akses kepabeanaan terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak yang telah inkraucht. *Joint Supervisory* yaitu melakukan pengawasan bersama dengan fokus pada wajib pajak yang belum sepenuhnya melaporkan kegiatan usahanya maupun wajib pajak yang diduga tidak melakukan kegiatan usaha secara normal.

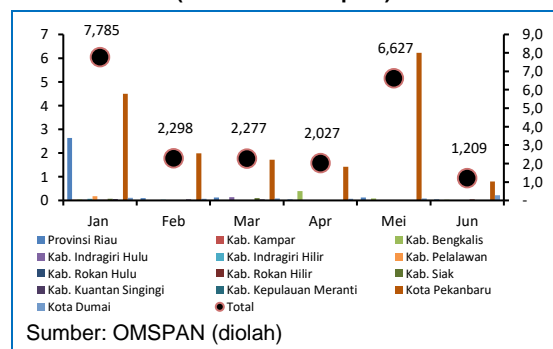
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP berjumlah Rp421,78 miliar, berkontribusi 5,30% terhadap total pendapatan, meningkat dibandingkan triwulan II 2018 yang mencapai Rp390,94 miliar. Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp220,59 miliar dan pendapatan BLU Rp 200,89 miliar. Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan PNBP Fungsional sebesar Rp198,36 miliar dan PNBP Umum sebesar Rp22,22 miliar.

Grafik 2.6 Realisasi PNBP Fungsional (dalam Miliar Rupiah)



Grafik 2.7 Realisasi PNBP Umum (dalam Miliar Rupiah)



Pendapatan PNBP Fungsional mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp4,83 miliar atau 2,38% dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp203,19 miliar. Pendapatan Jasa Kepelabuhanan sebesar Rp 46,73 miliar merupakan penyumbang Pendapatan PNBP Fungsional terbesar 23,50%, diikuti oleh BPKB Rp 27,4 miliar (13,78%) dan STNK Rp 23.69 miliar (11,92%). Kota Pekanbaru menjadi penyumbang terbesar PNBP Fungsional, sementara Provinsi Riau menjadi penyumbang terkecil.

Pendapatan PNBP Umum tumbuh 101,94% dibanding tahun lalu yang sebesar Rp11 miliar. Pendapatan PNBP umum didominasi oleh Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL Rp5,42 miliar (24,85%), Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Rp3,64 miliar (16,70%) dan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Rp3,11 miliar (14,25%). Penyumbang terbesar PNBP Umum adalah Kota Pekanbaru, sementara Kabupaten Meranti menjadi penyumbang terkecil.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga semester I 2019 tercatat melambat meski mengalami kenaikan dua digit. Hingga paruh pertama, Kementerian Keuangan mencatat BNPB mencapai Rp 209,08 triliun atau 55,27% dari APBN tahun ini. Realisasi PNBPN tumbuh 18,24%, namun melambat dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, di mana PNBPN tumbuh 21%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, realisasi PNBPN di paruh pertama tahun ini tumbuh melambat lantaran harga komoditas yang lebih rendah dari tahun lalu. Realisasi penerimaan dari KND ini meningkat secara signifikan sebesar 93,3% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018 yang hanya mencapai Rp 35,58 triliun. Sektor lain yang menyumbang kinerja positif adalah PNBPN Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Realisasi penerimaan PNBPN Lainnya mencapai Rp 48,42 triliun atau 51,48% dari target APBN tahun 2019, atau tumbuh sebesar 6,48% yoy.

3. Pendapatan Hibah

Sampai dengan triwulan II 2019 terealisasi pendapatan hibah sebesar Rp1,10 miliar atau 27,16% dari total pagu. Pagu hibah ini berupa hibah langsung dalam negeri Rp4,05 miliar.

Tabel 2.2 Pagu dan Realisasi Pendapatan Hibah Lingkup Provinsi Riau s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2019

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Hibah			
Hibah Langsung Dalam Negeri	4.050.000.000	1.100.000.000	27,16
Total Hibah	4.050.000.000	1.100.000.000	27,16

Sumber: Monev PA

Untuk hibah langsung dalam negeri yang teregistrasi sampai dengan 30 Juni 2019 senilai Rp 16,72 miliar yang terdiri dari hibah langsung uang Rp 9,72 miliar (Rp5,67 miliar belum melakukan penyesuaian pagu DIPA) dan hibah langsung barang Rp6,99 miliar (tidak dipagukan dalam DIPA). Hibah uang diterima oleh instansi di lingkungan BNN, Kemenhan (TNI-AD) dan POLRI. Sedangkan hibah barang yang diterima sebagian besar berupa tanah dengan instansi penerima di antaranya adalah Kejaksaan RI, Kemenhan (TNI-AD) dan Kementerian Agama.

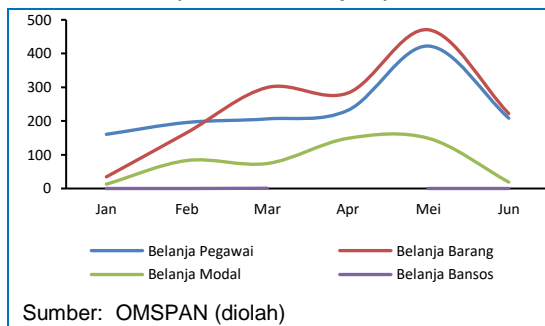
B. Belanja Negara

Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan triwulan II tahun 2019 tercatat Rp3,39 triliun atau 43,38% dari pagu belanja Rp7,81 triliun. Angka tersebut di atas target penyerapan anggaran sebesar 40%.

Grafik 2.8 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)



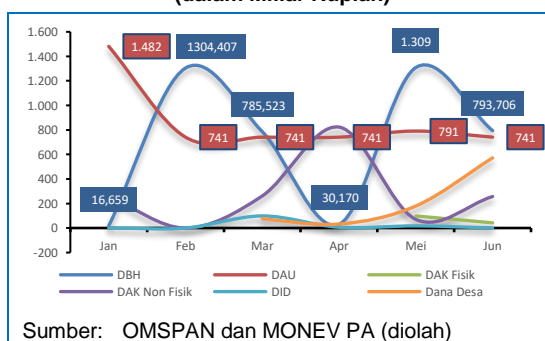
Realisasi belanja pegawai sebesar Rp1,43 triliun (51,92%), belanja barang Rp1,48 triliun (43,53%), belanja modal Rp486,59 miliar (29,41%), dan belanja bantuan sosial Rp1,22 miliar (5,84%). Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp1,04 triliun. Hal tersebut terjadi karena adanya rapel kenaikan gaji PNS/TNI/POLRI,

pembayaran THR, dan remunerasi 13. Total realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan yang signifikan 29,03% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp2,63 triliun.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2019 di Provinsi Riau mencapai Rp26,97 triliun, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp21,65 triliun. Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2019 sebesar Rp12,27 triliun atau 45,49% dari total pagu. Jumlah ini berada di atas realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp9,32 triliun. Angka kenaikan terbesar disumbang oleh realisasi DBH sebesar Rp4,24 triliun di mana periode yang sama tahun lalu Rp2,99 triliun.

Grafik 2.9 Realisasi TKDD s.d. Triwulan II 2019 (dalam Miliar Rupiah)



Realisasi TKDD terbanyak adalah transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,24 triliun, diikuti transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp4,24 triliun, dan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp1,67 triliun serta Dana Desa sebesar Rp859,9 miliar. Realisasi tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei dengan total realisasi sebesar Rp2,46 triliun dan bulan Juni sebesar Rp2,40 triliun.

3. Pengelolaan BLU

Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2019 sebesar Rp429,84 miliar. Meskipun secara nominal mengalami peningkatan, pagu ini turun secara porsi terhadap total pagu belanja dari turun dari 50,61% menjadi 50,36%. Sampai dengan triwulan II 2019, realisasi belanja sumber BLU meningkat baik secara nominal maupun persentase, yaitu dari Rp152,25 miliar (32,99%) menjadi Rp173,65 (40,40%). Sejalan dengan itu, pelayanan kepada masyarakat juga mengalami peningkatan baik dari sisi peningkatan jumlah mahasiswa, jumlah sarana prasarana, dan sebagainya. Perkembangan pagu belanja BLU diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019

Satker BLU	2018						2019					
	RM		BLU		SBSN		RM		BLU		SBSN	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Universitas Riau	218,29	92,83	314,49	101,19	-	-	213,39	97,99	300,30	122,85	-	-
UIN Sulthan Syarif Kasim Riau	171,15	47,34	125,71	43,50	55,80	11,50	149,51	49,31	111,09	43,50	55,80	11,50
Rumkit Bhayangkara Pekanbaru	5,12	2,03	21,36	7,57	-	-	5,02	2,13	18,45	7,30	-	-
TOTAL	394,56	142,20	461,56	152,25	55,80	11,50	367,92	149,44	429,84	173,65	55,80	11,50

Sumber: OMSPAN, MONEV PA (diolah)

4. Manajemen Investasi Pusat

Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah Daerah dan BUMD. Sampai dengan triwulan II 2109 piutang negara yang berstatus aktif tersebar di empat debitur, yaitu Pemprov Riau, Pemkab Kampar, Pemkab Indragiri Hulu dan PDAM Indragiri Hilir. Dua debitur masih mempunyai sisa pinjaman, yaitu Pemprov Riau sebesar Rp14,33 miliar dan Pemkab Indragiri Hulu sebesar Rp6,08 miliar, keduanya dalam proses penyelesaian *debt swap*. Sedangkan sisanya telah melunasi hutangnya dan dalam proses penutupan pinjaman.

Tabel 2.4 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau s.d. Triwulan II Tahun 2019 (dalam juta rupiah)

No	Debitur	Pinjaman Pokok	Pembayaran Pokok	Tunggakan Non Pokok	Hak Tagih	Keterangan
1	Pemprov Riau	6.042,94	6.042,94	14.328,03	14.328,03	Proses <i>Debt Swap</i>
2	Pemkab Kampar	287,02	287,02	-	-	Proses penutupan
3	Pemkab Indragiri Hulu	2.510,82	2.510,82	6.081,46	6.081,46	Proses <i>Debt Swap</i>
4	PDAM Kab. Inhil	1.161,35	1.161,35	-	-	Proses penutupan
	Jumlah	10.002,14	10.002,14	20.409,49	20.409,49	

Sumber: *Subsidiary Loan Information System (SLIM)*

Berdasarkan hasil verifikasi BPKP sebagaimana tercantum dalam surat Direktur Sistem Manajemen Investasi nomor S-129/PB/2019 tanggal 23 Maret 2019, *debt swap* Pemda Indragiri Hulu dinyatakan telah memenuhi kriteria *debt swap* sesuai PMK 176/PMK.05/2016, sedangkan Pemprov Riau hasilnya dinyatakan belum sesuai dengan

kriteria, khususnya kriteria kegiatan *debt swap* yang bermanfaat langsung kepada masyarakat. Direktorat SMI menyatakan bahwa untuk penyelesaian *debt swap* tersebut akan dilakukan perubahan PMK 176/PMK.05/2016 karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan penyelesaian piutang negara pada saat ini.

C. Prognosis Realisasi APBN

Pendapatan negara hingga akhir 2019 diperkirakan terealisasi Rp16,77 triliun (89,94%), meningkat dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2018 sebesar Rp16,26 triliun. Sementara itu, belanja negara diprediksi terealisasi Rp30,93 triliun atau 87,63% dari pagu belanja dan berada di atas realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp29,94 triliun. Proyeksi tersebut diperoleh berdasarkan data historis beberapa tahun sebelumnya. Namun terdapat beberapa hal lain yang diperkirakan akan mempengaruhi realisasi transfer ke daerah, di antaranya: 1) potensi tidak salur DAK Fisik sebesar Rp204,79 miliar, 2) potensi tunda bayar DBH triwulan IV 2019 sebesar Rp2,75 triliun, 3) potensi pembayaran tunggakan DBH tahun sebelumnya sebesar Rp198,50 miliar, sehingga perkiraan belanja negara terkoreksi menjadi Rp28,18 triliun atau 79,84%.

Tabel 2.5 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau s.d. Triwulan IV Tahun 2019

Uraian	Pagu (miliar)	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
Pendapatan Negara	18.641	7.948	42,64	16.766	89,94
Belanja Negara	35.293	15.656	44,36	28.177	79,84
Surplus/Defisit	-16.652	-7.708	46,29	-11.411	68,53

Sumber: SPAN dan hasil prognosis menggunakan *forecasting*

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

**Tabel 3.1 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2018 dan Tahun 2019
(dalam miliar Rupiah)**

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
PENDAPATAN	30.826,97	6.592,81	21,39	33.501,51	14.987,17	44,74
PAD	7.060,48	1.040,39	14,74	6.597,70	2.439,22	36,97
Pajak Daerah	4.798,53	750,88	15,65	4.741,69	1.920,59	40,50
Retribusi Daerah	358,82	34,92	9,73	322,97	56,73	17,57
Hasil Pengelolaan Kekayaan Dipisahkan	418,35	116,63	27,88	357,82	1,40	0,39
Lain-lain PAD yang Sah	1.484,79	137,96	9,29	1.175,23	460,49	39,18
Pendapatan Transfer	23.662,94	5.551,60	23,46	26.564,84	12.490,41	47,02
Transfer Pempus - Dana Perimbangan	20.960,95	5.290,55	25,24	23.544,22	11.328,09	48,11
Dana Bagi Hasil Pajak	4.347,69	987,2	22,71	3.605,16	1.659,56	46,03
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	4.151,43	1.017,92	24,52	5.828,14	2.580,33	44,27
Dana Alokasi Umum	8.386,63	2.871,16	34,23	8.968,51	5.236,37	58,39
Dana Alokasi Khusus	4.075,19	414,26	10,17	5.142,41	1.851,82	36,01
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.569,15	235,68	15,02	1.516,73	725,69	47,85
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	404,61	125,24	30,95
Dana Penyesuaian	1.569,15	235,68	15,02	1.076,45	571,88	53,13
Dana Insentif Daerah	-	-	0,00	35,67	28,57	80,09
Transfer Pemerintah Provinsi	1.101,28	25,37	2,30	1.209,45	364,85	30,17
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1.101,28	25,37	2,30	1.209,45	364,85	30,17
Transfer Bantuan Keuangan	31,56	-	-	294,45	71,79	24,38
Bankeu dari Pem. Prov/Kab/Kota Lainnya	31,56	-	-	294,45	71,79	24,38
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	103,55	0,81	0,78	338,97	57,54	16,98
Pendapatan Hibah	103,55	0,77	0,74	276,87	1,60	0,58
Pendapatan Lainnya	-	0,04	-	62,10	55,94	90,09
JUMLAH PENDAPATAN	30.826,97	6.592,81	21,39	33.501,51	14.987,17	44,74
BELANJA	27.512,44	2.929,71	10,65	29.374,13	9.085,17	30,93
Belanja Pegawai	10.783,77	1.739,89	16,13	11.243,24	4.805,77	42,74
Belanja Barang	8.538,02	844,54	9,89	9.155,61	2.658,29	29,03
Belanja Subsidi	32,31	-	-	32,53	15,95	49,03
Belanja Hibah	2.167,27	220,97	10,20	1.502,29	700,36	46,62
Belanja Bantuan Sosial	77,87	-	-	204,09	83,11	40,72
Belanja Modal	5.864,88	124,27	2,12	7.182,45	821,22	11,43
Belanja Tidak Terduga	48,3	-	-	53,93	0,48	0,89
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	4.540,89	50,74	1,12	4.264,78	1.323,85	31,04
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	1.555,07	-	-	1.751,76	517,56	29,55
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.548,10	-	-	1.741,23	517,56	29,72
Transfer Bagi Hasil Pend. Lainnya	6,98	-	-	10,53	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	2.985,81	50,74	1,70	2.513,02	806,29	32,08
Transfer Bankeu ke pmda Lainnya	643,13	-	-	1.358,95	384,79	28,31
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.336,82	50,74	2,17	1.148,33	420,77	36,64
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5,86	-	-	5,74	0,74	12,94
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	32.053,33	2.980,45	9,30	33.638,92	10.409,02	30,94
SURPLUS/DEFISIT	(1.226,36)	3.311,11	-	(137,41)	4.578,14	(3.331,81)

Sumber: BPKAD se-Provinsi Riau

Secara agregat, total APBD tahun anggaran 2019 di Provinsi Riau pada sisi

pendapatan sebesar Rp33,50 triliun naik dari tahun sebelumnya Rp2,67 triliun (8,68%).. Pada sisi belanja sebesar Rp33,64 triliun, meningkat 4,95% dibanding tahun sebelumnya, sehingga defisit sebesar Rp137,41 miliar.

Dari postur APBD tersebut di ketahui bahwa pendapatan daerah didominasi oleh pendapatan transfer sebesar Rp26,56 triliun (79,29%), yang berarti tingkat ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi. Adapun belanja daerah didominasi oleh belanja operasional sebesar Rp22,14 triliun (75,36%), sedangkan belanja modal hanya sebesar Rp7,18 triliun (24,45%). Kecilnya porsi belanja modal dapat berakibat pada berkurangnya kemampuan APBD dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

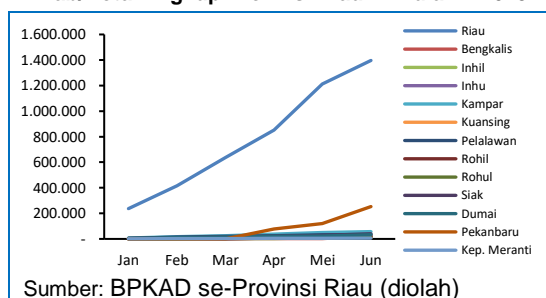
A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2019 sebesar Rp6,6 triliun yang berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp4,74 triliun atau 71,86%, retribusi daerah Rp322,97 miliar (4,9%), hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp357,82 miliar (5,42%), dan lain-lain PAD yang sah Rp1,17 triliun (17,81%). Total realisasi PAD sebesar Rp2,44 triliun atau 36,97% dari total target.

a. Penerimaan Pajak Daerah

Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab/Kota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2019

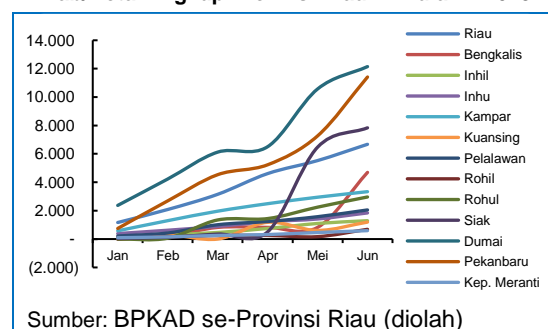


Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1,92 triliun atau 40,50% dari target, didominasi oleh Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp1,4 triliun, 72,72% dari total penerimaan pajak daerah diikuti Kota Pekanbaru sebesar Rp253,2 miliar (13,18%). Jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan II tahun lalu, mengalami peningkatan sebesar Rp24,59 miliar (1,3%).

b. Penerimaan Retribusi Daerah

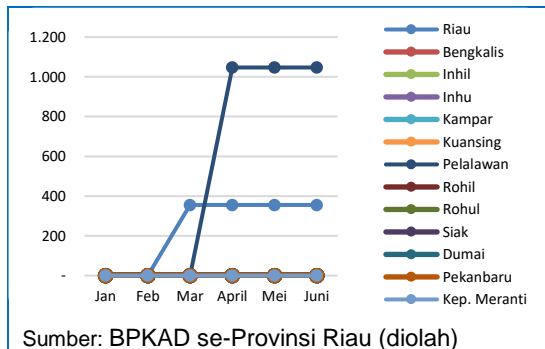
Penerimaan retribusi daerah direalisasikan Rp56,73 miliar atau 17,57% dari target penerimaan. Penerimaan terbesar berada di Kota Dumai sebesar Rp12,15 miliar (21,41%). Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi Triwulan II tahun lalu, mengalami penurunan sebesar Rp40,27 miliar.

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab/Kota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2019



c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019

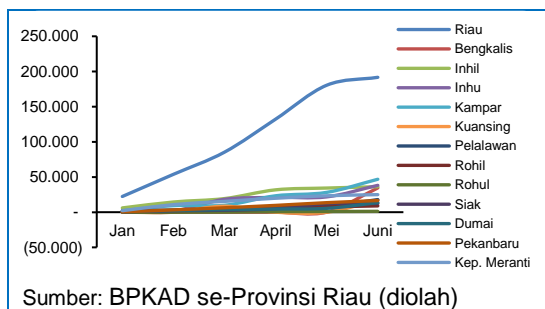


Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1,40 miliar atau sebesar 0,39% dari target, jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun lalu, mengalami penurunan sebesar Rp221,60 miliar. Hal ini dikarenakan realisasi baru terjadi pada dua pemda, yaitu Kabupaten Pelalawan sebesar 1,04 miliar atau 9,42% dari pagu, dan Provinsi Riau

sebesar Rp355,4 juta atau 0,26% dari pagu.

d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Grafik 3.4 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019

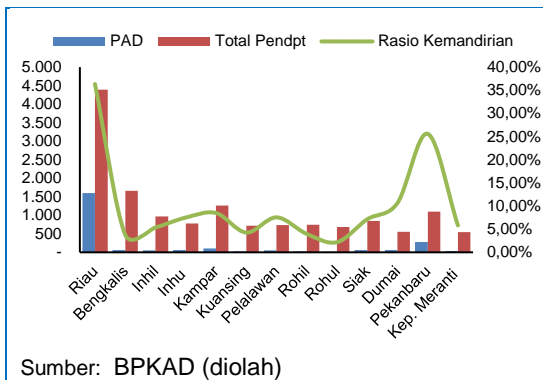


Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi Rp406,49 miliar (39,18%), terbesar berada di Provinsi Riau sebesar Rp191,74 miliar atau 41,64%, diikuti oleh Kabupaten Kampar sebesar Rp46,85 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan II tahun lalu, mengalami penurunan sebesar Rp33,51 miliar (6,78%).

PEKANBARU (RIAUPOS.CO-21 Juni 2019) -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada tahun ini mengaku akan menempuh beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari sektor pajak. Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, pada tahun ini Pemprov Riau sudah mulai mengembangkan inovasi baik dalam pendekatan pelayanan maupun pemberian kemudahan pelayanan perpajakan. Di antaranya yakni inovasi pengembangan armada Samsat keliling dan Samsat gendong. Kemudian juga peningkatan kantor pelayanan, dari unit pelayanan menjadi unit pelaksana teknis pendapatan. Selain itu, dengan melakukan penambahan jaringan pelayanan melalui pembukaan gerai Samsat di pusat perbelanjaan dan juga mal pelayanan publik, multi kanal dan juga Samsat online yang terintegrasi secara nasional. Melakukan kerja sama pertukaran data dengan BPH Migas dan upaya penegakan hukum melalui operasi penertiban pajak dan retribusi. Termasuk mengkaji kembali kebijakan pemberian pengurangan penghapusan pokok dan denda pajak.

Penerimaan PAD memberi kontribusi sebesar 16,28% dari total pendapatan daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD triwulan II tahun 2018, realisasi tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp269,78 miliar (9,96%). Penyebab penurunan tersebut antara lain adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penurunan tarif pajak air permukaan, penurunan tarif pajak bahan bakar minyak, dan masih rendahnya penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (baru terealisasi di dua pemda yaitu Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau).

Grafik 3.5 Perbandingan Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2019

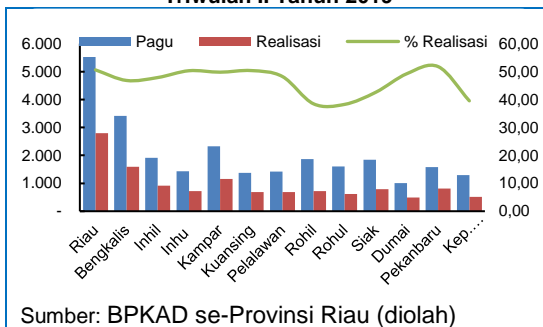


Rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (36,35%), diikuti Kota Pekanbaru dan Kota Dumai masing-masing 25,60% dan 10,64.

Sisanya, berada di bawah 10% dan yang terendah berada di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 2,19%.

2. Pendapatan Transfer

Grafik 3.6 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019



Target pendapatan transfer tahun 2019 sebesar Rp26,56 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp12,49 triliun (47,02%). Realisasi pendapatan transfer terbesar berada di Pemprov Riau sebesar Rp2,79 triliun atau 22,35% dari total realisasi pendapatan dan Pemkab Bengkalis sebesar Rp1,6 triliun (12,78%).

Realisasi transfer sampai dengan triwulan II 2019 tidak sesuai dengan target pendapatan transfer khususnya pada realisasi DBH SDA (44,27%), DAK (36,01%), dan Dana Desa (22,87%). Hal ini disebabkan antara lain karena tunda bayar DBH, adanya kegiatan DAK Fisik yang gagal salur sebesar Rp 204,79 miliar atau 10,51%, dan lambatnya penyerapan dana desa.

Riau Pos (30 Juli 2019)- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengambil langkah kebijakan rasionalisasi anggaran tahun 2019 di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar, untuk mengatasi agar tidak terjadi tunda bayar dalam pelaksanaan kegiatan barang dan jasa maupun fisik. Mengingat Pemerintah Pusat akan melakukan tunda bayar terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan IV tahun 2019.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

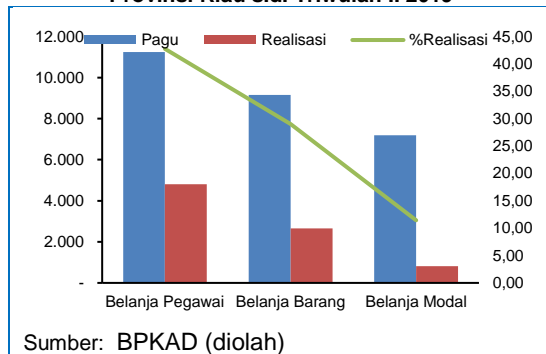
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp338,97 miliar, hanya 1,92% dari total target pendapatan daerah. Target pendapatan ini berasal dari pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan hibah lainnya (hibah dari PT Jasa Raharja). Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai

dengan triwulan II 2019 sebesar Rp57,54 miliar atau 16,98% dari target.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Grafik 3.7 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Riau s.d. Triwulan II 2019



Belanja APBD terbesar adalah belanja pegawai dengan pagu Rp11,24 triliun (38,28% dari total pagu belanja), belanja barang dengan pagu Rp9,16 triliun (31,17% dari total pagu belanja), dan belanja modal Rp7,18 triliun (24,45% dari total pagu belanja).

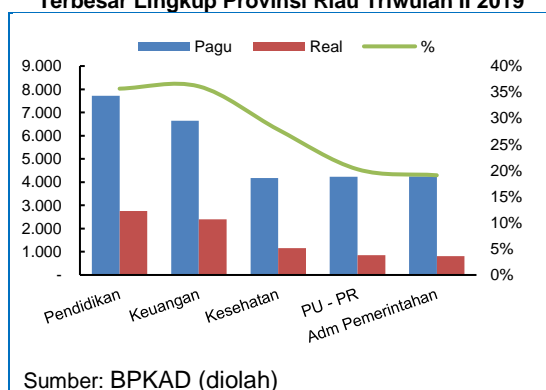
Belanja pegawai dengan realisasi Rp4,80 triliun (42,74% dari pagu belanja pegawai)

atau 52,9% dari total realisasi belanja, diikuti oleh belanja barang dengan realisasi Rp2,66 triliun (29,03% dari pagu belanja barang) atau 29,26% dari total realisasi belanja. Sementara itu, belanja modal hanya terealisasi Rp821,22 miliar (11,43% dari pagu belanja modal) atau 9,04% dari total realisasi belanja.

Hal ini menunjukkan bahwa proporsi belanja APBD didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang yang sifatnya belanja operasional, sedangkan belanja modal relatif kecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan efisiensi terhadap belanja pegawai maupun belanja barang antara lain dengan melakukan rasionalisasi jumlah pegawai maupun pengurangan belanja perjalanan dinas baik frekuensi, jumlah orang maupun penurunan tarifnya.

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Grafik 3.8 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2019



Pagu belanja daerah terbesar digunakan untuk urusan pendidikan, yaitu mencapai Rp7,71 triliun (26,26%) atau 9,37% dari total pagu belanja, diikuti urusan keuangan mencapai Rp6,65 triliun (22,64%) atau 9,37% dari total pagu belanja, dan urusan kesehatan mencapai Rp4,17 triliun (14,20%) atau 3,95% dari total pagu belanja, urusan PU-PR mencapai Rp4,24 triliun (14,43%) atau 2,92% dari total pagu belanja, dan urusan administrasi pemerintahan mencapai Rp4,24 triliun (14,43%) atau 2,76% dari total pagu belanja.

Hal ini berarti pemerintah daerah berkomitmen untuk fokus dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan di daerahnya (urusan pendidikan telah melampaui mandatory yang ditetapkan sebesar 20% dan kesehatan 10%).

Realisasi belanja per urusan digunakan untuk belanja urusan pendidikan, urusan keuangan, dan urusan kesehatan masing-masing sebesar Rp2,75 triliun (35,67%), Rp2,4 triliun (36,1%), dan Rp1,16 triliun (27,82%).

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019

Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2019 diperkirakan dapat direalisasikan sebesar Rp33,09 triliun atau 98,77% dari target pendapatan. Sementara itu, perkiraan belanja daerah yang direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp28,28 triliun atau 84,07% dari pagu belanja. Proyeksi tersebut diperoleh dengan aplikasi Microsoft Excel berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya. Namun terdapat beberapa hal yang diperkirakan akan mempengaruhi hasil proyeksi tersebut, antara lain : 1) potensi tidak salur DAK Fisik sebesar Rp204,79 miliar, 2) potensi tunda bayar DBH triwulan IV 2019 sebesar Rp2,75 triliun, 3) potensi pembayaran tunggakan DBH tahun sebelumnya sebesar Rp198,50 miliar. Berdasarkan hal tersebut realisasi pendapatan daerah pada akhir triwulan IV 2019 diperkirakan mencapai Rp27,33 triliun dan belanja daerah sebesar Rp25,53 triliun, sehingga diperkirakan terjadi surplus sebesar Rp1,82 triliun.

Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau s.d. Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	%	Rp	%
Pendapatan Daerah	33.501,51	14.987,17	44,74	27.337,75	81,60
Belanja Daerah	33.638,92	10.409,02	30,94	25.527,00	75,89
Surplus/Defisit	-137,41	4.578,14	-3.331,81	1.810,75	-1.317,77

Sumber: BPKAD, diolah dan hasil prognosis menggunakan *forecasting*

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu.

**Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau
s.d. Triwulan II Tahun 2019 (dalam miliar rupiah)**

Uraian	2019			Kenaikan	2018
	Pusat	Daerah	Konsolidasi		Konsolidasi
Pendapatan Negara	6,251	14,550	8,533	5.39%	10.721
Pendapatan Perpajakan	5,830	1,921	7,750	17.42%	8.013
PNBP	422	579.4	1,003	(28.89%)	1.204
Pendapatan Hibah	-	2	2	-	2
Pendapatan Transfer	-	12,048	(220)	(348.63%)	1.502
Belanja Negara	15,656	9,972	13,360	52.07%	13.696
Belanja Pemerintah	3,388	9,085	12,473	43.03%	12.752
Transfer	12,268	887	887	1264.80%	943
Surplus/(Defisit)	(9,405)	4,578.0	(4,827)	600.32%	(2.975)
Pembiayaan	-	627	627	116.58%	257
Penerimaan Pembiayaan	-	627	627	124.32%	277
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	(100.00%)	20
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(9,405)	5,205	(4,200)	950.59%	(2.718)

Sumber: LKPK Triwulan II Tahun 2018 dan 2019 Provinsi Riau

Catatan:

1. Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah
2. Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat

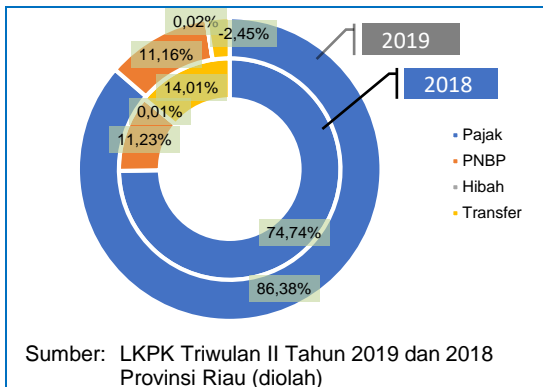
B. Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II tahun 2019 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian, PNBP konsolidasian, pendapatan hibah konsolidasian, dan pendapatan transfer konsolidasian. Realisasi pendapatan konsolidasian mengalami penurunan sebesar 20,41% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali pendapatan hibah yang sedikit mengalami kenaikan sebesar 3,91%. Pendapatan pajak yang menjadi penyumbang utama pendapatan konsolidasian mengalami penurunan sebesar 3,28%.

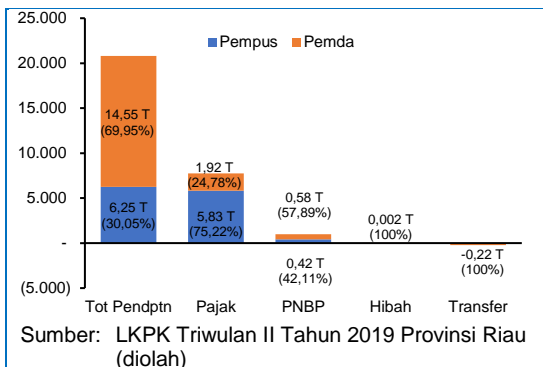
Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2018



Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2019 sebesar Rp8,53 triliun, sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp7,75 triliun, atau 90,83% dari total pendapatan, diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian Rp1,00 triliun (11,73%). Pendapatan perpajakan konsolidasian menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp263,1 miliar. Sementara itu

pendapatan transfer konsolidasian minus Rp220 miliar. Hal tersebut terjadi karena pendapatan transfer dari Pempus yang dicatat oleh seluruh pemda provinsi dan kabupaten/kota lebih kecil dibanding belanja transfer yang dicatat oleh Pempus. Demikian juga pendapatan transfer dari provinsi yang dicatat oleh seluruh pemda kabupaten/kota lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemprov Riau, sehingga pada saat dilakukan eliminasi di tingkat konsolidasian pemda maupun konsolidasian pemda dan Pempus pendapatan konsolidasian bernilai negatif (minus).

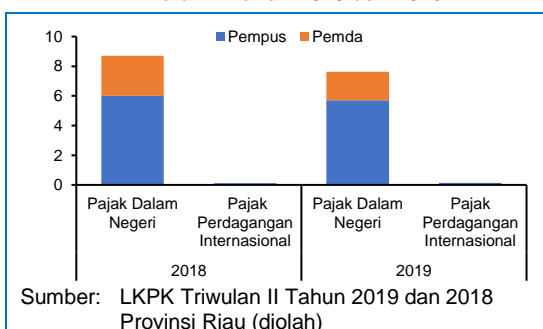
Grafik 4.2 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019



Realisasi pendapatan Pemerintah Pusat sebesar Rp6,25 triliun, sebagian besar berasal dari pendapatan perpajakan sebesar Rp5,83 triliun. Pendapatan pemerintah daerah didominasi oleh pendapatan transfer sebesar Rp12,47 triliun (sebelum dikonsolidasi), diikuti pendapatan perpajakan sebesar Rp1,92 triliun dan PNBP sebesar Rp579,4 miliar.

2. Analisis Perubahan

Grafik 4.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah Triwulan II Tahun 2019 dan 2018



Penerimaan perpajakan konsolidasian disumbang oleh penerimaan pajak dalam negeri sebesar 98,30% yang berasal dari pemerintah pusat sebesar 74,79% dan sisanya 25,21% dari pemerintah daerah. Sementara itu penerimaan pajak internasional hanya menyumbang Rp131,44 miliar atau hanya 1,70%.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2018 dan 2019 (dalam miliar rupiah)

Uraian	2018		2019	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Pendapatan Perpajakan	8.013	21,41%	7.750,1	-3,28%
PNBP	1.204	-14,47%	1.000,9	-16,86%
Hibah	2	0,00%	1,6	3,91%
Transfer	1.502	1.598,23%	-220,0	-114,64%
Total Pendapatan	10.721	32,42%	8.532,6	-20,41%
PDRB/Pertumbuhan Ekonomi	188.280	2,38%	189.950	2,80

Sumber: BPS, LKPK Triwulan II Tahun 2018 dan 2019 Provinsi Riau (diolah)

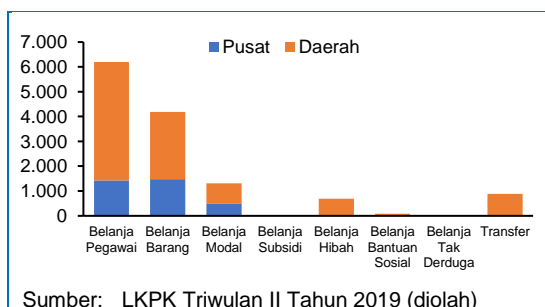
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2019 sebesar 2,80%. Pada periode yang sama, pendapatan gabungan yang diterima oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp8,53 triliun atau turun 20,41%. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tetapi pendapatan pemerintah justru menurun menunjukkan adanya potensi penerimaan belum dioptimalkan oleh pemerintah.

C. Belanja Konsolidasian

Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal.

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik 4.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau Triwulan II 2019



Belanja Konsolidasian triwulan II tahun 2019 Provinsi Riau sebesar Rp13,34 triliun. Porsi terbesar adalah belanja pegawai yang mencapai 42,39%, diikuti oleh belanja barang sebesar 31,30%, sedangkan belanja modal hanya mempunyai porsi 9,79%, kemudian belanja transfer sebanyak 6,64%.

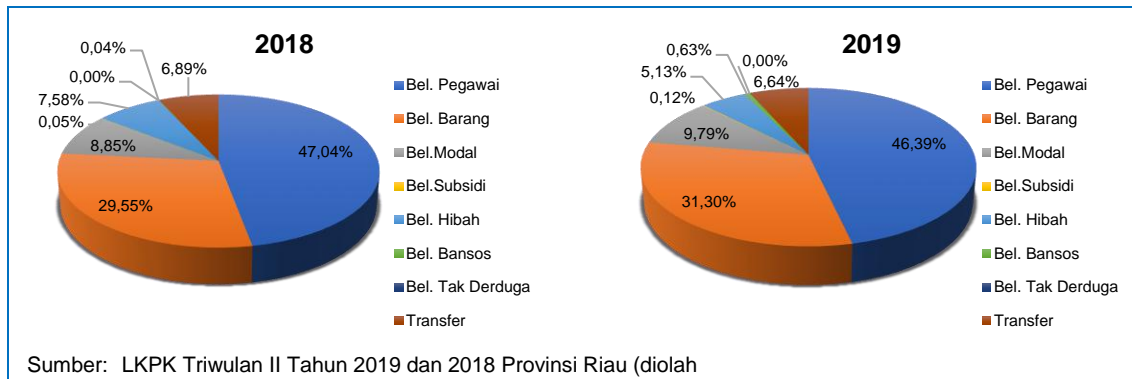
2. Analisis Perubahan

Belanja konsolidasian sebesar Rp13,36 triliun mengalami penurunan 2,45% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Jenis belanja yang mengalami penurunan di antaranya belanja pegawai turun 3,80% dan transfer turun 6,03%. Sementara jenis belanja yang mengalami kenaikan di antaranya belanja barang naik 3,32% dan belanja modal naik 7,89%.

Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2019 mengalami sedikit perubahan

dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu. Pada tahun 2019 porsi belanja pegawai mengalami penurunan dari 47,04% menjadi 46,39%, sementara belanja barang dan belanja modal masing-masing naik menjadi 31,30% dan 9,79%.

Grafik 4.5 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2018 dan 2019



3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional

Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi perekonomian regional ke arah yang lebih baik. Untuk mengukur keberhasilan kebijakan fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian regional, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia.

Tabel 4.3 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2018 dan 2019

Indikator Ekonomi Regional	2018	2019
Belanja Pemerintah (miliar rupiah)	13.696	13.359
Pertumbuhan ekonomi (%)	2,38	2,80
Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB (%)	3,83	2,11
Tingkat Kemiskinan (%)	7,39	7,08
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,72	5,57
Indeks Pembangunan Manusia	72,44	(belum ada)

Sumber: LKPK Triwulan II 2018 dan 2019 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penurunan belanja pemerintah dan kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDRB pada tahun 2019 tidak mempengaruhi perbaikan perekonomian regional. Hal ini ditandai dengan naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan TPT, serta peningkatan IPM yang mengindikasikan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.

D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB

Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi pemerintah dan investasi. Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah untuk kompensasi pegawai, penggunaan barang dan jasa, dan pengeluaran lainnya yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian.

**Tabel 4.4 Laporan Operasional Konsolidasian Tingkat Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019**

Uraian	Jumlah
Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto	
Pendapatan:	6.952.749.171.622,4
Pajak	1.920.594.039.960,1
Kontribusi Sosial	-
Hibah	1.064.729.522.919,3
Pendapatan Lainnya	3.967.425.608.743,0
Beban:	1.066.897.635.122,7
Kompensasi Pegawai	6.283.875.653.525,0
Penggunaan Barang dan Jasa	4.016.089.887.123,0
Konsumsi Aset Tetap	-
Subsidi	15.947.876.804,0
Hibah	-9.867.852.069.024,3
Manfaat Sosial	84.221.940.530,0
Beban Lainnya	534.614.346.165,0
Keseimbangan Operasi Bruto/neto	5.885.851.536.499,7
Transaksi Aset Non Keuangan Neto	1.307.809.008.082,8
Aset Tetap	1.298.124.588.276,8
Perubahan Persediaan	-
Aset Non Produksi	9.684.419.806,0
Net Lending/Borrowing	4.578.042.528.416,9
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	
Akuisisi Neto Aset Keuangan	4.578.042.528.416,9
Dalam Negeri	4.578.042.528.416,9
Luar Negeri	-
Keterjadian Kewajiban Neto	-
Dalam Negeri	-
Luar Negeri	-

Sumber: LSKP Triwulan II 2019 Provinsi Riau (diolah)

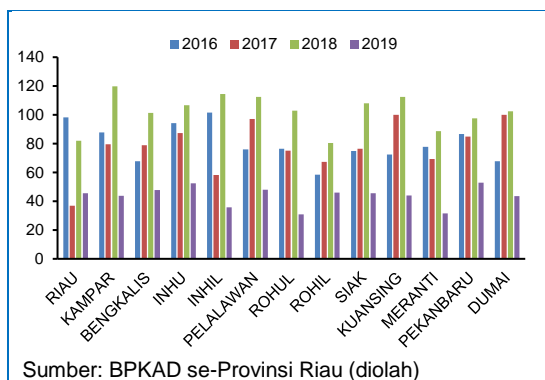
Konsumsi pemerintah pada triwulan II tahun 2019 sebesar Rp4,06 triliun. Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 2,11% dari PDRB Provinsi Riau sebesar Rp189,95 triliun. Sementara itu, kontribusi pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah sebesar 0,68%. Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset tetap yang berjumlah Rp1,30 triliun.

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Jangan Tergantung Dana Bagi Hasil (DBH), Maksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan ke depan dapat mengurangi ketergantungan dengan DBH karena besaran DBH yang diperoleh mengalami penurunan, sementara defisit APBD terus terjadi. Hal tersebut ditegaskan Bupati Rokan Hilir H. Suyatno.” (Riau Pos, Kamis, 25 Juli 2019).

Grafik 5.1 Persentase Realisasi DBH terhadap Pagu DBH Provinsi Riau

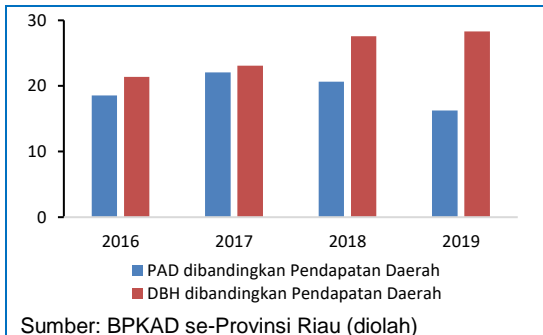


Ketergantungan terhadap DBH tersebut juga dialami oleh pemerintah daerah lainnya se-Provinsi Riau. Dari grafik dapat dilihat bahwa persentase realisasi penerimaan DBH terhadap pagu DBH selama tahun 2016 s.d 2019 cenderung mengalami penurunan (kecuali pada tahun 2018, mengalami kenaikan karena adanya pembayaran tunda bayar tahun

sebelumnya). Hal ini mengingat penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Seperti diketahui bahwa DBH di Riau sebagian besar berasal dari DBH Migas. Artinya, jika realisasi penerimaan migas terus menurun, maka realisasi DBH migas pun akan terus menurun.

UU Nomor 12 tahun 2018 tentang APBN tahun anggaran 2019 pasal 11 telah mengatur bahwa penyaluran DBH untuk triwulan IV tahun 2019 diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DBH triwulan IV terdapat kemungkinan akan dilakukan tunda bayar, disesuaikan dengan kondisi penerimaan dan kemampuan keuangan negara. Oleh karenanya, diharapkan dari awal pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Sehingga pemda tidak terlalu bergantung pada DBH, mengingat sampai saat ini proporsi realisasi DBH terhadap pendapatan daerah relatif lebih besar dari proporsi PAD terhadap pendapatan daerahnya.

Grafik 5.2 Proporsi Realisasi DBH dan PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Riau



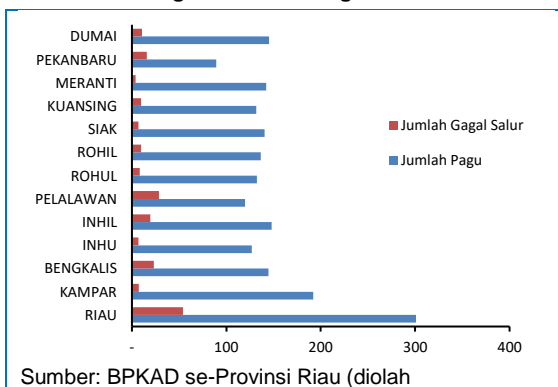
Salah satu alternatif untuk mengatasi ketergantungan terhadap DBH, pemerintah daerah harus dapat melakukan berbagai inovasi, kreativitas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sektor-sektor yang bisa dikelola untuk peningkatan PAD di Provinsi Riau antara lain: perkebunan, retribusi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), parkir, penangkaran walet dan sebagainya. Jika potensi itu dikelola dengan baik maka peningkatan PAD akan dapat direalisasikan.

B. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tidak terealisasi/termanfaatkan oleh Pemerintah Daerah

“DAK Fisik bagi kota Pekanbaru mencapai Rp15 miliar tidak terealisasi akibat kendala dalam tender. Masalah ini dipastikan Wali Kota Pekanbaru H. Firdaus, tidak akan berlalu begitu saja. Pejabat terkait yang terbukti lalai hingga serapan DAK Fisik tidak maksimal dipastikan akan dicopot.” (Riau Pos, 2 Agustus 2019)

Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2019 mendapatkan total pagu DAK Fisik sebesar Rp89,28 miliar. Dari jumlah tersebut, data kontrak yang telah di-upload ke aplikasi OMSPAN sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp73,52 miliar (termasuk kontrak penunjang yang tanpa ada kontrak fisik dalam bidang bersangkutan), sisanya sebesar Rp15,77 miliar atau 17,66% tidak di-upload karena tidak ada data kontraknya. Konsekuensinya adalah dana tersebut tidak dapat disalurkan pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal serupa juga terjadi pada beberapa kabupaten/kota yang lain se-Provinsi Riau sebagaimana grafik berikut :

Grafik 5.3 Jumlah Total Pagu DAK Fisik dan Jumlah Pagu DAK Fisik Gagal Salur



Total pagu DAK Fisic kabupaten/kota se-Provinsi Riau sebesar Rp1,95 triliun, dari jumlah tersebut yang berpotensi tidak terealisasi/tidak tersalur sebesar Rp204,79 miliar atau 10,51%, adapun potensi tidak salur DAK Fisic Tahap II terjadi pada DAK Fisic Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebesar Rp2,73 miliar. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah yang mengalami potensi tidak salur DAK Fisic tahun 2019 secara berurutan dari yang terbesar tidak salurnya adalah (1) Pemprov

Riau sebesar Rp54,09 miliar (17,99%) dari pagu, (2) Pelalawan sebesar Rp28,69 miliar (23,98%), (3) Bengkalis sebesar Rp23,18 miliar (16,05%), (4) Indragiri Hilir sebesar Rp19,57 miliar (13,24%), (5) Pekanbaru sebesar Rp15,76 miliar (17,66%), (6) Dumai sebesar Rp10,67 miliar (7,36%), (7) Kuantan Singingi sebesar Rp9,77 miliar (7,43%), (8) Rokan Hilir sebesar Rp9,55 miliar (7,01%), (9) Rokan Hulu sebesar Rp8,43 miliar (6,37%), (10) Kampar sebesar Rp7,28 miliar (3,79%), (11) Siak sebesar Rp7,00 miliar (4,98%), (12) Indragiri Hulu sebesar Rp6,95 miliar (5,48%), (13) Kepulauan Meranti sebesar Rp3,77 miliar (2,66%).

Dalam hal pagu DAK Fisik gagal salur, sementara di lapangan proses pekerjaan dan/atau pengadaan barang dan jasa telah terlanjur berjalan, maka pembiayaan atas dana DAK Fisik tersebut menjadi beban pemerintah daerah/APBD. Hal ini tentunya akan menambah beban fiskal pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerah untuk membayar pengeluaran DAK Fisik dimaksud.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat ironi di saat sebagian besar pendapatan daerah masih sangat tergantung dari dana transfer pemerintah pusat (sekitar 70% pendapatan APBD berasal dari dana Transfer) dan postur belanja APBD sangat didominasi oleh belanja operasi hampir 75% (belanja barang dan belanja pegawai), namun ternyata terdapat dana DAK Fisik sebagai salah satu unsur dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk belanja modal fisik untuk dapat meningkatkan pertumbuhan di daerah, justru tidak dapat direalisasikan/dimanfaatkan, bahkan justru membebani APBD pemerintah daerah. Jika pendapatan pemerintah daerah terbatas, maka kemungkinan yang terjadi adalah kegiatan DAK Fisik tersebut akan tunda bayar atau pemerintah daerah mungkin melakukan rasionalisasi pada pos pengeluaran lainnya.

Oleh karena itu kiranya ke depan pemerintah daerah dapat mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman dan kendala-kendala pelaksanaan pengelolaan DAK masa lalu (tahap I) untuk perbaikan dalam pelaksanaan pengelolaan DAK Fisik tahap berikutnya, antara lain dengan segera melaksanakan kontrak-kontrak yang ada sehingga dapat menghasilkan output dan pagu DAK Fisik terealisasi sesuai dengan porsi yang ditetapkan sebagai dapat mengajukan pencairan tahap II DAK Fisik tersebut. Persyaratan untuk penyaluran DAK Fisik tahap II antara lain realisasi penyerapan dana minimal sebesar 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan adanya capaian output yang dihasilkan. Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa penyampaian dokumen persyaratan DAK Fisik tahap II tersebut paling lambat harus sudah disampaikan/di-*upload* ke aplikasi OMSPAN tanggal 21 Oktober 2019.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.249 PEKANBARU28116
TELEPON 0761 22686 FAKSIMILI 0761 22647
WEBSITE www.kanwildjpbn-riau.net

NOTA DINAS

NOMOR: ND-*455*/WPB.04/2019

Yth. : Direktur Jenderal Perbendaharaan
u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari : Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
Hal : Penyampaian Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2019
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
Tanggal : *12* Agustus 2019

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini disampaikan Laporan Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2019 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Tri Budhianto &